Peranan Pengadilan dalam penyelesaian sengketa bisnis melalui mediasi pasca Perma No.2 Tahun 2003 di
Pengadilan Negeri Jakarta Barat
SUNGARPIN, Prof.Dr. Nindyo Pramono, SH.,MS
Universitas Gadjah Mada, 2006 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

PERANAN PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI MEDIASI PASCA PERMA NO 2 TAHUN 2003 DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

Oleh:
Sungarpin, Nindyo Pramono, dan Paripurna Sugarda

INTISARI

Penelitian mengenai Peranan Pengadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Mediasi Pasca Perma No 2 Tahun 2003 Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan menemukan jawaban atas permasalahan perkara apa saja yang dapat diselesaikan dengan prosedur mediasi di pengadilan, bagaimana pelaksanaan Perma Mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan kekuatan hukum penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer, diperoleh dari penelitian lapangan, dengan menggunakan alat pengumpul data pedoman kuesioner dan wawancara. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan mengadakan studi literatur.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dipilihnya Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena Pengadilan Negeri Jakarta Barat merupakan salah satu pengadilan yang menangani perkara paling banyak di Indonesia. Dan sebagai salah satu pengadilan di ibu kota yang menangani banyak menangani sengketa bisnis.

Analisis secara kualitatif dilakukan terhadap data yang sudah diseleksi guna penyusunan laporan penelitian yang bersifat deskriptif.

Kesimpulan yang dapat dikemukakan dari hasil penelitian ini adalah pertama, semua sengketa perdata dapat diselesaikan melalui proses mediasi.Kedua, Perma mediasi telah dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat sesuai aturan namun belum ada sengketa yang bisa diselesaikan melalui proses mediasi. Ketiga, kekuatan hukum penyelesaian sengketa melalui mediasi dipengadilan adalah berkekuatan hukum karena kesepakatan mediasi ditetapkan sebagai akta perdamaian oleh hakim.

Kata kunci : Perma Mediasi dan Peranan Pengadilan

Peranan Pengadilan dalam penyelesaian sengketa bisnis melalui mediasi pasca Perma No.2 Tahun 2003 di
Pengadilan Negeri Jakarta Barat
SUNGARPIN, Prof.Dr. Nindyo Pramono, SH.,MS
Universitas Gadjah Mada, 2006 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

THE ROLE OF THE DISTRICT COURT OF WEST JAKARTA IN SETTLING BUSINESS DISPUTE THROUGH MEDIATION AFTER THE ISSUANCE OF THE SUPREME COURT REGULATION No. 2/2003

ABSTRACT

Sungarpin[1], Nindyo Pramono[2], and Paripurna Sugarda[3]

The research on the role of court in settling business dispute through mediation after the issuance of the Supreme Court Regulation (PERMA) No. 2/2003 in the District Court of West Jakarta is a juridical normative research. It aims to study cases supposed to be solved through mediation procedure in the Court, the implementation of the Supreme Court Regulation on Mediation in the District Court of West Jakarta, and the legal force of dispute settlement through mediation in the court.

The research uses primary data that are obtained from field research using interview and questionnaire guideline, and secondary data from library research by means of literature study. It locates in the District Court of West Jakarta considering that it is one of the Courts handling most cases in Indonesia and also one of the courts in the Capital that settles many business disputes. The research applies qualitative method for data analysis and descriptive method for report presentation.

Based on the findings, the research concludes that 1) all civil disputes are settled through mediation process, 2) the District Court of West Jakarta has implemented the Supreme Court Regulation on mediation, yet it has not settled any dispute through mediation process, 3) dispute settlement through mediation in the court has legal forces, as the Judges decided mediation agreement as a reconciliation act.

Keywords: The Supreme Court Regulation (PERMA), and Role of Court

[1] Counsel for the Prosecution, Jakarta
[2] Faculty of Law, Gadjah Mada University Yogyakarta
[3] Faculty of Law, Gadjah Mada University Yogyakarta